

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia adalah keadaan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, kebodohan dan pendidikan atau melek angka. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berdirinya badan usaha yang ada di Indonesia. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat luas. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018 jumlah kemiskinan dan pendidikan di masing-masing provinsi khususnya Provinsi Jawa Timur yaitu kemiskinan sebesar 4292.15 ribu jiwa sedangkan pendidikan sebesar 99.80 ribu jiwa. Jumlah dari data tersebut membuktikan bahwa permasalahan keadaan sosial di Indonesia masih cukup tinggi dan belum dapat terselesaikan. Dalam hal ini keberadaan yayasan menjadi sangat penting karena dapat membantu lembaga pemerintah dalam pemberian kesejahteraan kepada masyarakat seperti dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan mengontrol kualitas pendidikan untuk mencapai standar layanan minimal di sekolah atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (UU No. 16 Tahun 2001). Kemudian UU No. 16 Tahun 2001 tersebut digantikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang beraktifitas diluar struktur politik yang terinstitusionalisasi dan merupakan entitas jasa sukarelawan yang bertujuan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial. Disebutkan juga bahwa yayasan adalah salah satu contoh lembaga organisasi nirlaba di Indonesia.

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Lembaga nirlaba memiliki perbedaan karakteristik dan tujuan organisasional dengan perusahaan yang berorientasi laba namun persamaan antara akuntansi yayasan dengan akuntansi perusahaan adalah meliputi proses

akuntansi mulai dengan pengakuan transaksi, selanjutnya diikuti dengan pencatatan ke buku kas umum dan pencatatan dalam buku pembantu serta tambahannya dan laporan-laporan keuangan. (Yuliarti, 2014). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak sehingga yayasan juga membutuhkan standar akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang sesuai.

Taufiqullah (2011) menyatakan, kegiatan akuntansi akan selalu ada dan dapat dilaksanakan selama manusia masih berhubungan dengan kegiatan keuangan (transaksi keuangan) baik dalam perusahaan berbentuk badan maupun perseorangan, baik orientasi laba maupun nirlaba. Maka kegiatan akuntansi tersebut perlu digunakannya standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia salah satunya PSAK. PSAK No. 45 merupakan standar keuangan yang khusus untuk pelaporan keuangan entitas nirlaba yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dengan adanya pedoman pelaporan keuangan diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (IAI, 2014: 45.1). Sehingga standar akuntansi keuangan ini dapat dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK 45.

Dilihat dari pentingnya laporan keuangan bagi sebuah organisasi-organisasi nirlaba, pengelola organisasi nirlaba harus mampu memberikan laporan keuangan yang baik kepada para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain. Dimana pihak manajemen organisasi harus dapat memikirkan bagaimana cara menyajikan laporan keuangan yang transparansi kepada pihak internal maupun eksternal dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan pada masyarakat. (fitriyah,2012). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI (2014:45.2), Laporan Keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo merupakan yayasan yang berlokasi di Jl. G. Kawi RT II RW I Dsn Bringin Desa langkap kec. Besuki kab. Situbondo. Yayasan ini berada di bawah naungan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Menurut Depsos RI (2004:4), panti asuhan atau LKSA merupakan lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadian sesuai

dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan Nasional.

Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo adalah salah satu yayasan yang bergerak dibidang penyaluran bantuan untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada anak yatim dan miskin bersekolah di perguruan Bustanul Abror, Mts, Mi dan sebagainya. Bantuan yang diberikan kepada yayasan ini berasal dari para donatur. Oleh karena itu, yayasan tersebut juga membutuhkan adanya pencacatan dan pelaporan agar menjaga kepercayaan dari para donatur serta tidak terjadi penyelewengan dana.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan pengasuh yayasan, diketahui bahwa Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo terdapat permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yayasan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang mudah dimengerti dan sesuai dengan SAK, namun fenomena yang terjadi di yayasan tidak demikian. Terbukti yayasan Siti Masyitoh hanya melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan saja. Sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan belum memenuhi asas transparansi pada yayasan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subjek organisasi nirlaba, seperti penelitian yang dilakukan Tinungki dan Rudy (2014) yaitu penelitian yang mengkaji tentang Penerapan laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang ada di Panti Sosial belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan nirlaba yang ada di PSAK No. 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan pengeluaran, laporan realisasi dan laporan posisi kas menurut pemahaman yayasan. Penelitian yang dilakukan Norita (2014) yang mengkaji tentang Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappentim Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Yabappentim sudah memenuhi peraturan perundang-undangan zakat untuk membuat laporan keuangan. Namun komponen laporan keuangan yang dibuat belum lengkap dan belum memenuhi komponen laporan keuangan menurut SAK 45. Penelitian yang dilakukan Utomo dan Indah (2014) yang mengkaji tentang Penerapan PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Penolong Anak Yatim dan Miskin Perguruan Darul Islam di Kota Gresik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Yayasan Anak Yatim dan Miskin Perguruan Darul Islam di Kota Gresik dapat menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 meskipun terdapat keterbatasan dari penelitian yang terletak pada tidak disusunnya laporan keuangan, dikarenakan yayasan tidak melakukan pencacatan secara lengkap.

Melihat uraian diatas, peneliti memandang bahwa penerapan SAK 45 merupakan hal yang penting untuk diterapkan di dalam organisasi nirlaba untuk menjang transparansi serta kesesuaian antara laporan keuangan organisasi nirlaba

dengan standar yang berlaku yakni SAK 45 terutama SAK 45 (revisi 2014). Maka peneliti bertujuan untuk mengkaji penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo dengan berdasarkan standar keuangan PSAK 45 (revisi 2014).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo sudah sesuai dengan PSAK No. 45?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, berikut merupakan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo sudah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu berikutnya mengenai Penerapan laporan keuangan Yayasan Panti Siti Masyitoh Besuki Situbondo dengan mengacu pada PSAK No. 45

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

- a. Manfaat bagi Peneliti

Dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan entitas nirlaba serta PSAK No. 45 sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki.

- b. Manfaat bagi Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo

Dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam penyajian pelaporan keuangan yayasan yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik.